

**ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI  
PERKANTORAN DARI SISI PERDPEKTIF *VALUE FOR  
MONEY* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**RATI RAHMATULLAH  
NIM 07011181520001**

**Konsentrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Inderalaya, Ogan Ilir  
Tahun 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI  
PERKANTORAN DARI SISI PRESPEKTIF *VALUE FOR  
MONEY* BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**RATI RAHMATULLAH**

**07011181520001**

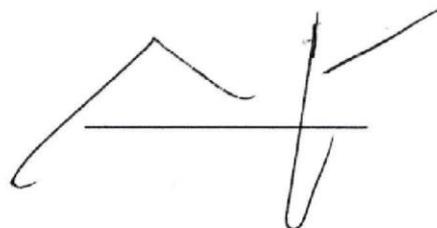
**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2020**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP 19631106 199003 1001**

**Pembimbing II**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.PA  
NIP 19810827 200912 1002**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dari Sisi Perspektif Value For Money Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 04 Maret 2020.

Palembang, 04 Maret 2020

Ketua

1. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004

4. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## MOTTO

“Ketika kamu meminta kesuksesan Allah tidak begitu saja memberimu kesuksesan melainkan Ia memberimu ketekunan beserta kekuatan untuk menghadapi rintangan menuju kesuksesan itu”

Dengan Rahmat Allah SWT,

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Ayah (Asian) dan Ibu (Sumiem)
- ❖ Suamiku (Tomi) dan Anakku (Alesha)
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang (Andriansyah, Abdillah dan Agung)
- ❖ Dosen-dosen, pegawai dan staf FISIP UNSRI
- ❖ Teman seperjuangan AP FISIP UNSRI 2015
- ❖ Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sedalam – dalamnya penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dari Sisi Perspektif *Value For Money* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017”. Berkat dorongan dari berbagai pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang begitu banyak memberikan motivasi, saran dan masukan sehingga proposal ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya.

Dalam perjalanannya penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material selama penyusunan prposal ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal ini, yaitu kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asian dan Ibunda Sumiem yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan baik bersifat moril maupun materil.
3. Suamiku Tomi yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar aku bisa segera menyelesaikan skripsiku.
4. Anakku Alesha yang sabar dan kuat di tinggal mami berminggu-minggu.
5. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran, motivasi serta semangat selama proses penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Admnistrasi Publik, juga sebagai Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran, motivasi, serta semangat selama perkuliahan dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis saat melaksanakan studi.
9. *Seluruh* pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan studi.
10. Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang-Bidang dan seluruh pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah terlibat, terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Sahabat seperjuanganku Betri, Cemong, Vivi Gapuak, Piyot, Eca, Olak, Yoga, Joshua, Rama, Linggom, Anggi dan Popong terima kasih untuk dukungan selama ini, semoga kita dipertemukan lagi dengan kesuksesan masing-masing, semoga persahabatan ini terus berlanjut.
12. Sahabatku yang jauh di tanah rantau Elma, Nesha, Mela, Sabrina, Selva, Jihan, Shera, Suci dan Nadia yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
13. Sahabat Eyanglicius Gustia, Dera, Erin, Yudho, Rizki, Anbiya, Leddy, Elys dan Riza yang selalu memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk berkumpul menghilangkan sedikit beban menulis skripsi.
14. Teman-teman satu angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2015 yang telah menjadi keluarga di kampus, semoga kita semua sukses

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan studi bagi rekan-rekan mahasiswa. Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Indralaya, Maret 2020

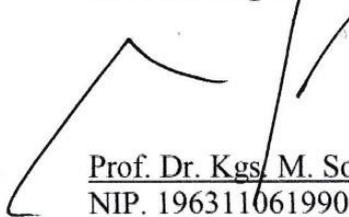
Penulis

## ABSTRAK

Dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money*. Tujuannya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumberdaya yaitu penggunaannya diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan, serta efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis anggaran program pelayanan administrasi perkantoran dari sisi prespektif *value for money* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Tingkat efektivitas anggaran program pelayanan administrasi perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017 angka realisasinya mencapai rata-rata 90%. Pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya yaitu 95,90%, tahun 2016 95,90% dan tahun 2017 97,94%. Dalam program pelayanan administrasi perkantoran Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2017 hanya ada beberapa kegiatan yang realisasinya masuk dalam kategori tidak efektif hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak terealisasi. Namun secara keseluruhan kegiatan yang ada dalam program tersebut sudah terealisasi secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yaitu rendahnya pencairan anggaran, keterlambatan administratif, kerumitan dalam proses persiapan anggaran, tingginya kegiatan antara kegiatan yang diusulkan dengan dana yang disetujui dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, proses penganggaran yang tidak fleksibel mendorong keterlambatan dalam proses revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, kurangnya sumber daya manusia dalam pembentukan panitia pengadaan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan baru.

**Kata Kunci : Efektivitas, Anggaran.**

**Pembimbing I**



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

**Pembimbing II**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

**Palembang, Maret 2020**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



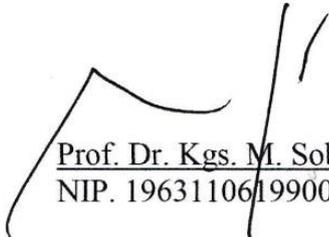
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **ABSTRACT**

*In carrying out its activities, public sector organizations are required to pay attention to value for money. The goal is to account for the implementation of value for money, which is economical in procurement and allocation of resources, efficient in the use of resources is minimized and the result is maximized, and effective in achieving Objectives and objectives. The purpose of this research is to analyze the budget of the office administration Services program from the reflective side value for money Regional Development Planning Board of South Sumatera Province, the year 2017. The level of budget effectiveness of the office Administration Services Program of Regional Development Planning Board of South Sumatera Province in 2015-2017 the realization figure reaches an average of 90%. In 2015 its effectiveness level was 95.90%, the year 2016 95.90% and the year 2017 97.94%. In the Office of Offices of Administrative Services of the Regional Development Planning Agency of South Sumatera Province in 2015-2017, there are only a few activities that have been realizing in this category ineffective due to several factors The activity is unrealized. But overall the activities in the program have been realized effectively. Factors that influence the budget realization of office administration Services Program in the BAPPEDA of South Sumatera Province, namely low budget disbursement, administrative delays, complexity in the process of budget preparation, high Activities among the proposed activities with the funds approved in the field of budget implementation, the Unflexible budgeting process encourages delays in the process of implementing the budget, lack of resources Procurement Committee and the lack of socialization about new regulations.*

**Keywords : Effectiveness, budget.**

**Advisor I**



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

**Advisor II**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

**Palembang, March 2020**  
**Chair of the Department of Public Administration**  
**Faculty of Social Science and Political Science**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Anggaran Sektor Publik .....	11
a. Pengertian Anggaran Sektor Publik .....	11
b. Fungsi Anggaran Sektor Publik .....	12
2. Keuangan Daerah .....	16
a. Pengertian Keuangan Daerah .....	16
b. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	18
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	21
4. Administrasi Perkantoran .....	22
5. Efektivitas .....	23
6. Value For Money .....	25
a. Konsep Umum Value For Money .....	25
1) Ekonomi .....	27
2) Efisiensi .....	28
3) Efektivitas .....	29
B. Teori Konsistensi yang Digunakan .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	32
D. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Definisi Konsep .....	36
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	38
E. Informan Penelitian .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Sistematika Penulisan .....	41

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Hasil dan Pembahasan Efektivitas Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laporan Konsolidasi Program APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program/Kegiatan Tahun 2015 .....	5
2. Laporan Konsolidasi Program APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program/Kegiatan Tahun 2016 .....	6
3. Laporan Konsolidasi Program APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program/Kegiatan Tahun 2017 .....	34
4. Penelitian Terdahulu .....	39
5. Fokus Penelitian .....	63
6. Anggaran Program Administrasi Perkantoran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 .....	65
7. Anggaran dan Realisasi Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 .....	65
8. Realisasi Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dirinci Menurut Kegiatan Tahun 2015 .....	66
9. Realisasi Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dirinci Menurut Kegiatan Tahun 2016 .....	67
10. Realisasi Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dirinci Menurut Kegiatan Tahun 2017 .....	73
11. Rencana program dan Kegiatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan .....	74
12. Perhitungan Tingkat Efisiensi Program dan Kegiatan Tahun 2017 .....	76
13. Perhitungan Tingkat Efektivitas Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 .....	76
14. Rincian Efektivitas Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 .....	77
15. Rincian Efektivitas Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 .....	77
16. Rincian Efektivitas Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 .....	78
17. Program dan Kegiatan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan .....	80
18. Rekapitulasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berdasarkan Perspektif Value For Money .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Value For Money secara Skematis .....	25
2. Indikator-indikator Konsep Value For Money .....	38
3. Kerangka Pemikiran .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi .....	88
2. Kartu Bimbingan dengan Dosen Pembimbing I .....	89
3. Kartu Bimbingan dengan Dosen Pembimbing II .....	90
4. Surat Pemohonan Izin Penelitian .....	91
5. Surat Balasan Izin Penelitian .....	92
6. Pedoman Wawancara .....	93
7. Peraturan Menteri Keuangan No 164/PMK.05/2011 .....	94
8. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 .....	95
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2016 .....	120
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Keuangan .....	126

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBD	= ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAPPEDA	= BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMSEL	= SUMATERA SELATAN
SDM	= SUMBER DAYA MANUSIA
DIPA	= DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGAR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Otonomi Daerah merupakan sebuah sistem yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurus semua sumber daya yang berada di daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah memiliki kebebasan dalam menjalankan dan menyusun setiap agenda yang akan dijalankan di daerah tersebut. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah otonom memiliki hak, wewenang maupun kewajiban dalam mengurus sendiri setiap urusan di daerah mereka masing- masing, termasuk dalam mengelola keuangan pemerintah daerah masing – masing.

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap publik

agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik pada daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2006:354).

Salah satu upaya untuk mengelola dana dari masyarakat semaksimal mungkin adalah dengan menyusun anggaran (*budget*) sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Anggaran merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen yang disusun organisasi dalam mencapai tujuan. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi dan diperdebatkan. Anggaran sektor publik merupakan *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan (Mahmudi, 2011:59).

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelajakan.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya.

Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Penggunaan anggaranpun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang petunjuk

penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran yang disebutkan bahwa agar anggaran belanja Kementrian Negara atau Lembaga dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undang, efisien, ekonomi dan efektif sehingga diharapkan tidak terdapat penyimpangan oleh satuan kerja dalam penggunaan anggaran.

Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga perencanaan yang menyusun dan menetapkan Renstra (Rencana Strategi) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Renstra (Rencana Strategi) BAPPEDA yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BAPPEDA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan, maka BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi dan sumberdaya di lingkungan BAPPEDA. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi salah satunya yaitu penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program / kegiatan / anggaran pelaksanaan kegiatan administrasi / penatausahaan keuangan serta saranan dan prasaranan kerja di BAPPEDA.

Pengukuran kinerja (tolak ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

**Tabel 1**

**Laporan Konsolidasi Program APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2015**

Program/Kegiatan	Penyediaan	Target Keuangan (Rp)	Realisasi
<b><u>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</u></b>	<b><u>2.545.198.000</u></b>	<b><u>2.447.747.036</u></b>	<b><u>2.447.747.036</u></b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.187.880	3.187.880
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	661.694.000	592.592.354	592.592.354
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	40.000.000	34.471.375	34.471.375
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19.800.000	18.600.000	18.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	198.000.000	196.285.000	196.285.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	159.460.000	157.946.250	157.946.250
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	75.000.000	74.674.350	74.674.350
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	33.523.400	33.523.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undang	26.000.000	25.990.000	25.990.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	66.000.000	65.830.000	65.830.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	308.100.000	308.100.000	308.100.000
Penyediaan Jasa Tutor SKJ	13.200.000	10.250.000	10.250.000
Penyediaan Jasa Operator Komputer	131.444.000	118.500.000	118.500.000
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Keluar Negeri	750.000.000	747.895.927	747.895.927

Sumber : Laporan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2015

Berdasarkan uraian tabel 1.1 Laporan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2015 dapat dilihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi rata – rata mencapai kriteria efektif. Pada program ini hanya 1 (satu) kegiatan yang realisasinya belum terealisasi secara maksimal yaitu Penyediaan Jasa Tutor SKJ. Kegiatan ini setiap minggunya rutin di laksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesegaran jasmani semua karyawan BAPPEDA setelah melakukan aktivitas yang melelahkan di dalam lingkungan kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Namun pada tahun 2015 hasil pencapaiannya kurang efektif hal ini dikarenakan kurangnya Tutor SKJ yang ada ataupun adanya hal – hal lain yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pada program ini seperti cuaca yang buruk sehingga pelaksanaannya kurang terealisasi.

**Tabel 2**

**Laporan Konsolidasi Program APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2016**

Program/Kegiatan	Penyediaan	Target Keuangan (Rp)	Realisasi
<b><u>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</u></b>	<b><u>2.324.606.734</u></b>	<b><u>2.292.835.185</u></b>	<b><u>2.292.835.185</u></b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.259.260	3.259.260
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	533.274.903	526.129.775	526.129.775
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11.400.000	11.400.000	11.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	198.000.000	197.395.000	197.395.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	158.000.000	157.853.450	157.853.450
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	76.878.311	75.995.500	75.995.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.063.300	29.063.300	29.063.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undang	24.000.000	18.875.000	18.875.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	55.000.000	53.695.000	53.695.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	308.100.000	308.100.000	308.100.000
Penyediaan Jasa Tutor SKJ	5.750.000	5.750.000	5.750.000
Penyediaan Jasa Operator Komputer	256.750.000	256.750.000	256.750.000
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	49.390.220	49.390.220	49.390.220
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Keluar Negeri	600.000.000	584.416.180	584.416.180
Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000	14.762.500	14.762.500

Sumber : Laporan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2016

Berdasarkan uraian tabel 1.2 diatas Laporan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2016 dapat dilihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi rata-rata mencapai kriteria efektif. Persentase ini menggambarkan bahwa sepanjang tahun 2016 Kantor BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan telah mampu mengelola anggaran di semua kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran yang telah mereka tetapkan diawal sehingga hal ini cukup memuaskan bagi kinerja Kantor BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan semua kegiatan tersebut telah mencapai target.

**Tabel 3**

**Laporan Konsolidasi Program APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2017**

Program/Kegiatan	Penyediaan	Target Keuangan (Rp)	Realisasi
<b><u>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</u></b>	<b><u>2.650.568.000</u></b>	<b><u>2.595.904.114</u></b>	<b><u>2.595.904.114</u></b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.0000	3.145.960	3.145.960
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	600.000.000	567.441.792	567.441.792
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17.000.000	11.400.000	11.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	198.000.000	197.395.000	197.395.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor	143.600.000	143.591.800	143.591.800
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	76.000.000	74.724.250	74.724.250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.993.000	29.993.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undang	10.000.000	9.937.000	9.937.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000	68.890.000	68.890.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	372.528.000	372.528.000	372.528.000
Penyediaan Jasa Tutor SKJ	14.000.000	9.000.000	9.000.000
Penyediaan Jasa Operator Komputer	310.440.000	310.440.000	310.440.000
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	50.000.000	48.942.200	48.942.200
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Keluar Negeri	700.000.000	694.702.112	694.702.112
Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	30.000.000	29.468.000	29.468.000
Analisa Jabatan dan Beban Kerja sesuai dengan Sktruktur baru berdasarkan PP 18 Tahun 2016	25.000.000	24.250.000	24.250.000

Sumber : Laporan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2017

Berdasarkan uraian tabel 1.3 Laporan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2017 dapat dilihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi rata – rata mendekati efektif. Pada kegiatan ini hanya 2 (dua) kegiatan yang realisasinya kurang efektif yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyediaan Jasa Tutor SKJ. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hal yang menyebabkan 2 (dua) kegiatan dalam program ini tidak terealisasi secara efektif.

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian sekretariat BAPPEDA, proses pelaksanaan ini tak lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan beberapa tugas tahunan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari sisi Perspektif *Value For Money*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu :

“Bagaimana Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari sisi Perspektif *Value for Money* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari sisi Perspektif *Value for Money* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017?

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu administrasi negara dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

### 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi objek penelitian, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan efektivitas anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

- 2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi tulisan mengenai efektivitas anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi aplikasi dari pengetahuan yang telah diperoleh selama dalam perkuliahan kedalam kehidupan nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

*Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.*

*Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit. Erlangga. Jakarta.*

*Gibson, James L. et al. 1997. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.*

*Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.*

*Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.*

*Mahsun, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta*

*Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.*

*Muindro, Renyowijoyo. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.*

*Mulyadi.Ananda, Citra. 2012. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011 (<http://publication.gunadarma.ac.id> diakses 3 Agustus 2016)*

*Singarimbun, Masri.1995. Metode Penelitian Survei. LP3S, Jakarta.*

*Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta*

*Steers Richard. M. 2005. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga Steers*

*Richard. M. 1980. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga*

Literatur Jurnal :

Assidiqi, Bahrun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. (<http://eprints.uny.ac.id> Diakses Jumat 2 Agustus 2016)

Annisa, Dian. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Melalui Pendekatan Value For Money*. Jurusan Akuntansi. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Peraturan-peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 – 2016

Laporan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Dirinci Menurut Program / Kegiatan Tahun 2015